



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004**



## **SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas  
 Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Untuk Memenuhi  
 Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
 Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh :**

**ASRA DARMA PUTRA**  
**NIM. 11427101524**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**  
**RIAU**  
**2021**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004**

Yang ditulis oleh :

Nama : ASRA DARMA PUTRA  
 NIM : 11427101524  
 Program Studi : ILMU HUUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sulyan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Mei 2021

Pembimbing Skripsi

  
**FIRDAUS, SH., MH**  
 NIP. 19661002 199403 1 002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 ”**, yang ditulis oleh:

Nama : **ASRA DARMA PUTRA**  
 NIM : 11427101524  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Telah dimunaqasyahkan pada :  
 Hari / Tanggal : Kamis, 15 Juli 2021  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Daring / online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juli 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. Heri Sunandar, MCL**

Sekretaris

**H. Henrizal Hadi, Lc., M.Si**

Penguji I

**Lysa Angraini, SH., MH**

Penguji II

**Asril, SH., MH**



Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197410062005011005





## ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah: “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004”

Pada prinsipnya tugas umum dari kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit. Dalam menjalankan tugasnya tersebut kurator bersifat independen dengan pihak debitur dan kreditur. Namun dalam kenyataannya di lapangan ada juga kurator yang menguasai harta perusahaan, dan dia juga mengatasnamakan harta perusahaan tersebut sebagai harga pribadinya. Tentunya hal ini telah bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pengangkatan kurator tersebut, yang seharusnya menyelamatkan harta kekayaan perusahaan dan membayar hutang-hutang perusahaan, tetapi malahan menjadi persoalan baru yang harus dihadapi oleh pemilik perusahaan tersebut, karena perbuatan curang yang dilakukan oleh kurator.

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator dalam penyelesaian perkara kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dan apa kendala yang dihadapi oleh kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis tentang pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator dalam penyelesaian perkara kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang tinjauan yuridis tentang pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator dalam penyelesaian perkara kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, pengurusan harta perusahaan yang dinyatakan pailit dilakukan oleh kurator yang ditunjuk oleh hakim dan diawasi oleh hakim pengawas. Kurator wajib melaporkan semua kegiatan yang dilakukan terhadap aset perusahaan kepada hakim pengawas dalam jangka waktu tiga bulan sekali. Kurator bertindak atas dasar kepentingan perusahaan yang pailit, agar dapat menyelesaikan semua kewajiban perusahaan.

Kendala yang dihadapi dalam pengurusan harta perusahaan yang dinyatakan pailit, antara lain adalah kendala dalam melakukan pendataan terhadap administrasi atau surat-surat aset atau harta perusahaan. Kemudian kendala dalam menjual aset perusahaan yang tidak sesuai dengan harga yang dikehendaki karena penawaran yang rendah, serta kendala dari pihak kurator yang melakukan kecurangan terhadap pengurusan harta perusahaan yang dinyatakan pailit tersebut.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, Ayah Zulkifli dan Ibu Erisnone(Alm) dan kakak-kakak, adik-adik yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk semuanya.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Khairunnas, M,Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Firdaus, SH.MH, dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Muslim, SH.MH, serta staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Firdaus, SH.MH yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
7. Kepada semua sahabat-sahabatku, yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Oktober 2020

Peenulis,

Asra Darma Putra  
Nim:11427101524



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

### PENGESAHAN

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.. ..	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	14

### BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN

A. Pengertian Perusahaan .....	15
B. Bentuk Perusahaan .....	21
C. Dasar Hukum Perusahaan .....	32
D. Fungsi Dan Tujuan Perusahaan .....	35
E. Tujuan Perusahaan .....	36

### BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan .....	38
B. Sejarah Kepailitan.....	40
C. Pengertian Pailit.....	42
D. Lembaga Kepailitan.....	44
E. Pengurusan Harta Pailit.....	46

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 .....	50
--	----





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kendala yang Dihadapi oleh Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit .....	60
--	----

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	65

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**







1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia usaha saat ini para pelaku usaha dapat melakukan usahanya dalam bentuk dan jenis yang bermacam-macam, tergantung keinginan dan modal yang tersedia. Usaha yang dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan pengembangan diri agar dapat bersaing dengan pelaku usaha yang lain sesuai dengan aturan yang berlaku.

Setiap pengusaha sudah pasti menginginkan perusahaannya mendapatkan keuntungan dari usaha yang dilakukan tersebut. Hal ini memang sudah menjadi suatu kewajiban bahwa setiap usaha yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Namun tujuan tersebut tidak selamanya dapat diwujudkan karena dalam menjalankan usaha tersebut berbagai hambatan dan kendala sudah pasti harus dihadapi. Oleh karena itu setiap pengusaha menjalankan usahanya dengan prinsip dan konsep yang jelas agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaannya, yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan yang bersangkutan.

Perusahaan yang dijalankan oleh pengusaha bentuknya bermacam-macam di antaranya adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa, “Dalam mendirikan perseroan terbatas tidak cukup dengan cara membuat akta

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendirian yang dilakukan dengan bantuan seorang notaris, akan tetapi harus dilalui pula proses pengesahan akta pendirian perseroan itu sehingga perseroan memperoleh status sebagai perseroan yang berbadan hukum.<sup>1</sup>

Sebagai sebuah perseroan, maka harus dipimpin oleh orang yang benar-benar mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan perusahaan agar bisa maju dan berkembang, sehingga mendapatkan keuntungan yang besar sebagaimana yang diinginkan. Keinginan tersebut tidak semudah membalik telapak tangan untuk mencapainya, tentunya membutuhkan banyak pengorbanan, cara dan dukungan dari semua pihak yang ada dalam perusahaan tersebut.

Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba.

Dari pengertian di atas ada dua unsur pokok yang terkandung dalam suatu perusahaan, yaitu:

1. Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan di Indonesia.
2. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian, yang dijalankan secara terus-menerus untuk mencari keuntungan.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>2</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 10

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat tersebut di atas memberi pemahaman bahwa, setiap jenis usaha melaksanakan kegiatan di bidang perekonomian dalam rangka untuk mencari keuntungan. Tentunya usaha yang dijalankan tersebut berada di bawah naungan sebuah perusahaan yang diberi nama Perseroan Terbatas (PT).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa, Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan Terbatas (PT) tidak selamanya dapat berjalan lancar, bisa saja perusahaan tersebut mengalami kesulitan terutama masalah keuangan, bahkan ada yang sampai pailit yang dinyatakan oleh Pengadilan Niaga, atas dasar permohonan yang diajukan oleh pihak-pihak tertentu, karena perusahaan yang bersangkutan tidak bisa lagi membayar hutang-hutangnya.

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayar-pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karna kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit tersebut secara profesional dan sesuai dengan struktur kreditur.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, dinyatakan bahwa yang dapat menjadi kurator adalah Balai Harta Peninggalan (BHP) atau kurator lainnya. Kurator lainnya yaitu kurator yang bukan Balai Harta Peninggalan, adalah mereka yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang.

Tugas dan kewenangan kurator relatif berat. Pada prinsipnya tugas umum dari kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit. Dalam menjalankan tugasnya tersebut kurator bersifat independen dengan pihak debitur dan kreditur. Ia tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur meskipun dalam keadaan biasa (di luar kepailitan) persetujuan atau pemberitahuan tersebut dipersyaratkan.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 69 Undang-undang No.37 Tahun 2004, kurator memiliki tugas :

- a) Melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.
- b) Segala perbuatan kurator tidak harus mendapat persetujuan dari debitur (meskipun dipersyaratkan).

<sup>3</sup>Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h. 34

<sup>4</sup>Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), h. 42)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c) Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga (dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit).

Untuk melakukan tindakannya, kurator harus memperhatikan, hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah dia berwenang untuk melakukan hal tersebut.
2. Apakah merupakan saat yang tepat (terutama secara ekonomi dan bisnis) untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.
3. Apakah terhadap tindakan tersebut diperlukan terlebih dahulu persetujuan/izin/keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti dari pihak hakim pengawas, pengadilan niaga, panitia kreditur, debitur, dan sebagainya.
4. Apakah terhadap tindakan tersebut memerlukan prosedur tertentu, seperti harus dalam rapat dengan kuorum tertentu, harus dalam sidang yang dihadiri/dipimpin oleh hakim pengawas, dan sebagainya, serta
5. Harus dilihat bagaimana cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan, dan sosial dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu, misalnya jika menjual aset tertentu, apakah melalui pengadilan, lelang, bawah tangan, dan sebagainya.<sup>5</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa, kurator dalam menjalankan tugas dalam mengurus harta perusahaan yang dinyatakan pailit harus memperhatikan hal-hal tersebut. Jadi kurator juga tidak boleh sesuka hatinya saja untuk bertindak dan melakukan perbuatan dalam mengurus harta perusahaan yang dinyatakan pailit tersebut.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasus Kepailitan Asuransi Bumi Asih dan Modus Kenakalan Kurator yang mengurus PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya ditetapkan sebagai tersangka penipuan dan pencucian uang. Minimnya pengawasan dari pengadilan memberi ruang lebar bagi kurator-kurator nakal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah mencabut izin PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Bumi Asih) sejak 2013. Namun, perusahaan asuransi jiwa itu baru resmi dinyatakan pailit oleh pengadilan pada 28 Agustus 2015. Saat itu, tiga orang kurator ditunjuk, mereka adalah Lukman Sembada, Raymond Pardede, dan Gindo Hutahean. Dalam proses kepailitan, kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor.

Kurator juga tak boleh menggunakan aset dan kekayaan debitor untuk kepentingan pribadi. Mereka akan mendapatkan imbalan atas jasa sebagai kurator, tetapi imbalan itu dibayarkan ketika proses kepailitan selesai. Bumi Asih Jaya Pailit Pemegang Polis Harap Ajukan Tagihan Setelah Tikar Perusahaan Asuransi Digulung Sayangnya, 18 Mei lalu ketiga kurator Bumi Asih ditangkap Bareskrim Polri. Mereka diduga melakukan penggelapan aset milik perusahaan asuransi untuk kepentingan pribadi. "Mereka mengalihkan hasil pencairan unit link, deposito, dan aset lain milik Bumi Asih," ujar Direktur Tipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Agung Setia dalam keterangan tertulis.

Hasil penyidikan menyebutkan bahwa total kerugian akibat perbuatan tersebut mencapai Rp20 miliar. Total aset Bumi Asih diperkirakan Rp1,1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

triliun. Sampai saat ini, jumlah kreditur Bumi Asih mencapai 29 ribu dengan total tagihan Rp1,2 triliun. Tim kurator belum pernah melakukan pembagian sejak perusahaan itu dinyatakan pailit tahun lalu. Ini bukan pertama kalinya kurator ditangkap pihak kepolisian dan menjadi tersangka. Tahun 2001 lalu, kurator PT Dharmala Sakti Sejahtera, yang pailit sejak 6 Januari 2000 juga sempat ditahan. Ari Ahmad Efendi ditahan dengan tuduhan menggandakan penjualan saham. Namun, ia kemudian dibebaskan karena ternyata tuduhan tersebut tidak benar. Dalam praktiknya, memang ada banyak sekali celah bagi kurator untuk mendapatkan keuntungan dari aset debitur. Hal ini diperkuat dengan minimnya pengawasan dari hakim pengawas yang telah ditunjuk pengadilan. Salah satu pengacara yang juga seorang kurator,

Aji Wijaya membenarkan itu. Menurutnya, sangat mungkin atau besar peluang seorang kurator berbuat curang dan nakal dengan berbagai cara saat mengurus aset. Misalnya dalam proses lelang dan penjualan. Ada kurator yang nakal, menjual aset dengan harga miring, lalu ia akan mendapat komisi dari pembeli. Padahal, UU mengatur bahwa kurator berhak menerima fee penjualan aset sebesar 10 persen dari harga jual. Fee itu di luar imbalan jasa sebagai kurator.

Modus lain yang kerap dilakukan para kurator, lanjut Aji, adalah dengan membalik nama aset. Jadi aset yang tadinya atas nama debitur dibalik nama menjadi nama pribadi kurator. Modus ini lebih riskan untuk diketahui dibandingkan dengan mencari keuntungan dari menjual aset dengan harga miring. “Ada juga yang punya cukong-cukong, jadi lelangnya dibikin

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedemikian rupa hingga gagal, dan akhirnya aset dijual bawah tangan dengan harga lebih murah," jelas Aji kepada Tirto

Terlepas dari semua modus nakal itu, para kurator juga terkadang menghadapi persoalan ketidakpahaman dari penegak hukum akan UU Kepailitan. Seperti kasus yang dihadapi kurator Dharmala misalnya. Karena dalam proses kepailitan, bukan hanya kurator yang berpotensi berlaku curang, debitur juga. "Pernah ada kurator yang dilaporkan karena jam debitur hilang. Debitur mengaku punya jam mewah 5 buah, padahal aslinya memang cuma 4," kata Aji. Terkait dengan fee jasa kurator, menurut UU Kepailitan, biaya tersebut dibayarkan setelah kepailitan berakhir. Berakhirnya kepailitan tentu setelah aset terjual dan tagihan dari para kreditur dibayarkan. Biaya yang boleh diambil di depan oleh kurator adalah biaya operasional pemberesan aset atau imbalan atas penjualan aset.

Minimnya Fungsi Pengawasan Kurator, dalam melakukan pekerjaannya, sebenarnya tak bisa semena-mena, karena ia sejatinya diawasi oleh hakim pengawas di Pengadilan. Tetapi, menurut pantauan Tirto, pengawasan di Indonesia minim sekali. Para hakim pengawas hanya mengawasi proses rapat kreditur. Mereka juga hanya memeriksa laporan dari para kurator yang disampaikan setiap tiga bulan. Laporan itu berisi perkembangan boedel pailit dan posisi keuangan. Hakim-hakim pengawas ini tampak pasif. Berbeda dengan hakim pengawas di negara seperti Belanda yang bisa bertindak lebih aktif.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Belanda, hakim pengawas kerap turun ke kantor debitur untuk melakukan inspeksi dan pengecekan. Di Indonesia, hal itu sulit sekali bisa dilakukan. Hakim pengawas di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tak hanya menjadi hakim pengawas, setiap hari, mereka juga mengurus perkara-perkara niaga lain. Bahkan ada juga yang menjadi hakim tindak pidana korupsi. Aji membenarkan itu. Berdasarkan pengalamannya menjadi kurator, pengawasan dari hakim pengawas memang dirasakannya kurang detail. “Kalau saya sih melihatnya memang sulit bagi hakim pengawas mengawasi secara independen dan detail untuk mencegah fraud dari kurator atau debitur, waktunya enggak memadai,” kata Aji.

Namun dalam kenyataannya di lapangan ada juga kurator yang menguasai harta perusahaan, dan dia juga mengatasnamakan harta perusahaan tersebut sebagai harga pribadinya. Tentunya hal ini telah bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pengangkatan kurator tersebut, yang seharusnya menyelamatkan harta kekayaan perusahaan dan membayar hutang-hutang perusahaan, tetapi malahan menjadi persoalan baru yang harus dihadapi oleh pemilik perusahaan tersebut, karena perbuatan curang yang dilakukan oleh kurator

Dari beberapa hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal ini dalam suatu penelitian yang berbentuk skripsi dengan mengambil judul:

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004”**

## **B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan dalam tulisan ini tidak meluas, maka penulis membatasi pada hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator dalam penyelesaian perkara kepailitan, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator dalam penyelesaian perkara kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator dalam penyelesaian perkara kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Bisnis, terutama menyangkut masalah pengelolaan dan pemberesan harta pailit oleh kurator.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai perjanjian perbankan pada masa yang akan datang.
3. Sebagai bahan untuk menambah khasanah perpustakaan, dan sebagai sumbangsih penulis kepada almamater, yakni UIN Suska Riau.

## E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif,<sup>6</sup> yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis tentang pengelolaan dan pemberesan harta pailit oleh kurator dalam penyelesaian perkara kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.74

<sup>7</sup> *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang tinjauan yuridis tentang pengelolaan dan pemberesan harta pailit oleh kurator dalam penyelesaian perkara kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

## 2. Data dan Sumber Data

Data adalah semua bahan yang dikumpulkan dalam suatu penelitian dan diuji kebenarannya.<sup>8</sup> Data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (sekunder).<sup>9</sup> Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka bidang hukum dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>10</sup> Sehubungan dengan penelitian ini maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer,<sup>11</sup> yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Bahan hukum sekunder,<sup>12</sup> yaitu berupa berbagai pendapat ahli yang dikutip dari berbagai literatur dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier,<sup>13</sup> yaitu bahwa yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti

<sup>8</sup>Gorys Keraf, *Komposisi*, (Jakarta: Nusa Indah, 1989), h.160

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h.11

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.33

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.142

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid*, h.143



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamus hukum, ensiklopedia dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka, penulis memperoleh data dengan cara mengumpulkan data berdasarkan studi terhadap perundang-undangan, pendapat ahli yang berupa buku-buku dan literatur lainnya.

### 4. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta peraturan perundang-undangan lainnya. selanjutnya penulis mempelajari secara terperinci, kemudian penulis mengolah dan menyajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, dan membandingkannya dengan teori-teori hukum yang ada serta pendapat para ahli.

Sedangkan cara penulis dalam mengambil kesimpulan dalam kajian ini adalah berpedoman kepada cara deduktif,<sup>14</sup> yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h.252

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN**

Yang berisi Pengertian Perusahaan, dan Bentuk Perusahaan.

### **BAB III TINJAUAN PUSTAKA**

Yang berisi Tinjauan Umum tentang Kepailitan, Sejarah Kepailitan, syarat-syarat pailit, Kurator, dan Kewajiban Kurator. Dasar Hukum Perusahaan, Fungsi dan Tujuan Perusahaan.

### **BAB IV BERISI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Yakni mengenai Tinjauan Yuridis Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dan kendala yang dihadapi oleh Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.

### **BAB V PENUTUP,**

Yang berisi Kesimpulan dan Saran-Saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN

#### A. Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.<sup>15</sup>

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Disebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>16</sup>

Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), namun dalam KUHD tidak memberikan penafsiran maupun penjelasan tentang perusahaan. Namun yang mengatur mengenai perseroan adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1618 KUH Perdata menyatakan, bahwa Perseroan adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau

<sup>15</sup>Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h.12

<sup>16</sup>Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.<sup>17</sup>

Salah satu bentuk usaha yang cukup banyak diminati dalam praktik bisnis adalah Perseroan Terbatas (PT), karena PT diyakini dapat menjadi sarana untuk pemupukan modal yang lebih besar, jika dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya. Selain itu PT juga dapat masuk ke Pasar Modal atau bursa efek apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang Pasar Modal.<sup>18</sup>

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.<sup>19</sup>

Pada umumnya orang berpendapat bahwa PT adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, dalam mana para pemegang saham (pesero) ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu

<sup>17</sup>C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), h.70

<sup>18</sup>Sentosa Sembiring, *Op., Cit*, h.13

<sup>19</sup>*Ibid*, h.13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).<sup>20</sup>

Perseroan Terbatas mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Ada beberapa hal dalam pendirian perseroan yaitu sebagai berikut:

1. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.
3. Dalam hal setelah perseroan disahkan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain.
4. Dalam hal setelah lampau jangka waktu sebagaimana di atas, pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.
5. Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

<sup>20</sup>C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op., Cit*, h.91

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

6. Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian disahkan oleh Menteri.
7. Dalam pembuatan Akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.<sup>21</sup>

Berlainan dengan perseroan firma dan perseroan komanditer, maka PT adalah suatu badan hukum. Hal ini berarti bahwa PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantara pengurusnya).

Walaupun suatu badan hukum itu bukanlah seorang manusia yang mempunyai pikiran/kehendak, akan tetapi menurut hukum ia dapat dianggap mempunyai kehendak. Menurut teori yang lazim dianut, kehendak dari pesero pengurus dianggap sebagai kehendak PT. Akan tetapi perbuatan-perbuatan pengurus yang bertindak atas nama PT, pertanggungjawabannya terletak pada PT dengan semua harta bendanya. Oleh karena itu, PT adalah suatu bentuk perseroan yang diatur dan dilindungi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).<sup>22</sup>

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (2) KUHD, PT harus didirikan dengan akta notaris, dengan ancaman tidak sah bila tidak demikian. Akta notaris ini adalah syarat mutlak untuk mensahkan pendirian PT. Dengan demikian adanya akta notaris pendirian itu bukanlah sekedar untuk menjadi alat pembuktian belaka, seperti halnya pada suatu Perseroan Firma. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka PT yang sudah didirikan tidak akan mendapat

<sup>21</sup>Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h.103

<sup>22</sup>C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op., Cit*, h.92

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengesahan oleh Menteri Kehakiman. Akta notaris pendirian itu berisi persetujuan-persetujuan PT yang di dalamnya dimasukkan anggaran-anggaran PT yang memuat:

- a. Nama PT.
- b. Tempat kedudukan.
- c. Maksud dan tujuan.
- d. Lamanya akan bekerja.
- e. Cara-cara bekerja dan bertindak terhadap pihak ketiga.
- f. Hak dan kewajiban persero dan pengurus.<sup>23</sup>

Menteri Kehakiman memberikan pengesahan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 37 dan Pasal 50 KUHD sebagai berikut:

- a. Harus nyata bahwa perseroan yang bersangkutan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 37 ayat 1). Untuk itu harus diselidiki dasar dan tujuan perseroan yang tercantum dalam anggaran dasarnya yang termuat dalam akta pendirian perseroan.
- b. Akta pendirian tidak boleh membuat peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang melanggar sesuatu yang telah diatur di dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 55 KUHD, misalnya tidak disebutkan berapakah jumlah modal perseroan.
- c. Dari akta harus nyata bahwa para pendiri pertama bersama-sama telah menetapkan (berjanji menyetor) sedikit-dikitnya seperlima dari modal perseroan atau modal dasar (Pasal 50 KUHD).

<sup>23</sup> *Ibid*, h.92

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- d. Dari sumber-sumber resmi yang dapat dipercayai diperoleh cukup alasan untuk menduga bahwa para pendiri tidak bertindak sebagai kedok-kedok belaka untuk orang-orang asing.
- e. PT yang bersangkutan berkediaman di Indonesia.<sup>24</sup>

Apabila syarat tersebut di atas dipenuhi barulah Menteri Kehakiman berwenang mengesahkan akta dimaksud. Apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pengesahan terhadap akta pendirian perseroan tersebut tidak dapat dilakukan oleh Menteri Kehakiman, atau dengan kata lain ditolak.

Maksud dan tujuan mendirikan perseroan adalah untuk meraih keuntungan finansial sebesar mungkin, sedangkan kegiatan usaha berkaitan dengan bidang usaha untuk mencapai maksud dan tujuannya. Pencantuman itu harus ada di anggaran dasar dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Perseroan yang tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, atau tidak mencantumkan klausula objeknya, maka dianggap cacat hukum sehingga keberadaannya tidak valid.<sup>25</sup>

Pencantuman maksud dan tujuan perseroan memegang peranan penting karena menjadi batas bagi kecakapan dan ruang lingkup kewenangan perseroan. Penentuan maksud dan tujuan ini merupakan salah satu perbedaan antara manusia dan badan hukum karena manusia dapat melakukan apa saja yang tidak dilarang hukum, sedangkan badan hukum hanya dapat melakukan

<sup>24</sup>*Ibid*, h.94

<sup>25</sup>Hasbullah F. Syawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), h.69



apa yang secara eksplisit atau implisit diizinkan oleh hukum atau anggaran dasarnya.

## B. Bentuk Perusahaan

Pada prinsipnya, perusahaan sebagai wahana/pilar pembangunan perekonomian yang diatur dalam KUH Perdata, KUH Dagang, dan peraturan perundang-undangan lainnya, terdiri dari tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan perseorangan, atau disebut dengan perusahaan individu, adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikan. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil, jenis serta jumlah produksi terbatas, memiliki pekerja/buruh yang sedikit, dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Perusahaan perseorangan dapat berbentuk perusahaan dagang/jasa (misalnya toko swalayan atau biro konsultasi) dan perusahaan industri. Contoh perusahaan perseorangan seperti toko kelontong, tukang bakso keliling, pedagang asongan, dan lain sebagainya.
2. Perusahaan persekutuan badan hukum yang dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan BUMN. Perseroan Terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang, dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam perseroan terbatas, pemilik modal tidak harus

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

memimpin perusahaan karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan perseroan terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya.

3. Perusahaan persekutuan bukan badan hukum atau disebut juga perusahaan persekutuan, yang artinya badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Badan usaha yang termasuk dalam badan usaha persekutuan adalah persekutuan perdata, persekutuan firma, dan perseroan komanditer. Untuk mendirikan badan usaha persekutuan dibutuhkan izin khusus pada instansi pemerintah yang terkait.

Perusahaan-perusahaan ada yang berbadan hukum, tetapi ada pula yang tidak berbadan hukum. Perusahaan berbadan hukum terdiri dari perusahaan-perusahaan swasta yang didirikan oleh perseorangan atau beberapa orang secara bekerja sama dan perusahaan negara yang didirikan dan dimiliki oleh negara.

Persekutuan perdata pada intinya bukan bentuk badan usaha sebagaimana dimaksud dalam dunia bisnis. Persekutuan perdata merupakan awal terbentuknya perusahaan/badan usaha yang merupakan hasil suatu persekutuan, seperti persekutuan firma, persekutuan komanditer, maupun perseroan terbatas.

Menurut Pasal 16 KUHD, persekutuan firma adalah persekutuan yang diadakan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan nama bersama. Jadi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

persekutuan firma adalah setiap perusahaan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama (firma) sebagai nama yang dipakai untuk berdagang bersama-sama.

Persekutuan komanditer atau biasa disebut CV, yang merupakan singkatan dari *commanditaire vennootschap*, diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHD. Menurut Pasal 19 KUHD, perseroan komanditer dibentuk untuk menjalankan suatu perusahaan, yang terdiri dari satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) di satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang di pihak yang lain.

Pada dasarnya, persekutuan komanditer adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau lebih sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang sebagai pemasukan pada persekutuan tapi tidak turut serta dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan itu. Dengan kata lain, status seorang sekutu komanditer dapat disamakan dengan seseorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan dan hanya menantikan hasil keuntungan dari uang, benda, atau tenaga pemasukannya itu saja sedangkan ia sama sekali lepas tangan dari pengurusan perusahaan.

Perseroan terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *naamloze vennootschap* (NV). Istilah terbatas di dalam perseroan terbatas tertuju pada tanggung jawab

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal dari semua saham yang dimilikinya.<sup>26</sup>

Suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas (PT) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

#### 1. Badan Usaha

Badan usaha maksudnya adalah suatu lembaga atau perkumpulan/persekutuan yang menjalankan usaha dalam bentuk hukum tertentu seperti perusahaan dagang, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, dan lain-lain. Bentuk-bentuk hukum dari badan usaha ini dapat dilihat dari akta pendiriannya yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

#### 2. Kegiatan dalam Bidang Perekonomian

Kegiatan atau usaha dalam bidang perekonomian dapat dibedakan dalam tiga bidang, yaitu sebagai berikut:

- a. Usaha dalam arti kegiatan perdagangan, yaitu keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan baik di dalam maupun di luar negeri ataupun antarnegara untuk tujuan memperoleh keuntungan. Contoh kegiatan ini adalah menjadi diler, agen, grosir, toko, dan sebagainya.
- b. Usaha dalam arti kegiatan industri, yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa yang nilainya lebih berguna dari

---

<sup>26</sup>*Ibid*, h.66



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asalnya. Contoh kegiatan ini adalah industri pertanian, perkebunan, pertambangan, pabrik semen, pakaian, dan sebagainya.

- c. Usaha dalam arti kegiatan melaksanakan jasa-jasa, yaitu kegiatan yang melaksanakan atau menyediakan jasa-jasa, yang dilakukan baik oleh perorangan maupun suatu badan. Contoh kegiatan ini adalah melakukan kegiatan untuk jasa perhotelan, konsultan, asuransi, pariwisata, pengacara/akuntan dan sebagainya.
3. Kegiatan dalam bidang perekonomian tersebut harus dilakukan secara terus-menerus, tidak insidental, dan merupakan pekerjaan sehari-hari untuk mendapatkan penghasilan dengan menghitung rugi/laba.
4. Secara Terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga)

Secara terang-terangan maksudnya adalah terbuka untuk umum, diketahui oleh semua orang, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Secara terang-terangan itu dapat dilihat dari izin usaha dan izin tempat usahanya, serta surat keterangan pendaftaran perusahaan tersebut. izin-izin dan surat keterangan dibuat oleh pejabat yang berwenang.

5. Mengadakan Perjanjian Perdagangan

Mengadakan perjanjian perdagangan maksudnya adalah mengadakan perjanjian jual-beli, serta mengadakan produksi barang dan jasa untuk dijual kepada pihak ketiga yang biasanya disebut dengan konsumen.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Harus Bermaksud Memperoleh Laba

Kegiatan perdagangan itu dilakukan untuk memperoleh penghasilan, keuntungan/laba. Penghasilan, keuntungan/laba ini menunjukkan adanya nilai lebih yang diperoleh dari modal yang dipergunakan. Dengan demikian, setiap kegiatan perdagangan harus disertai dengan sejumlah modal, yang dengan modalnya ini harus diusahakan untuk mendapat keuntungan atau laba.

## 7. Melakukan pembukuan

Pembukuan maksudnya adalah catatan yang berisikan hak dan kewajiban pihak yang melakukan kegiatan perekonomian. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan menentukan bahwa perusahaan diwajibkan untuk membuat catatan. Catatan ini terdiri dari neraca tahunan, perhitungan rugi-laba tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, dan catatan lain yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian yang dilakukan.<sup>27</sup>

Dari unsur-unsur perusahaan sebagaimana dikemukakan di atas, dapat dirumuskan bahwa suatu perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan.

Setiap perusahaan sudah pasti menginginkan keuntungan dari usaha yang dilakukannya. Hal ini sebagai salah satu tujuan yang akan diraih oleh

---

<sup>27</sup>*Ibid*, h.11

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah perusahaan, yakni mencari keuntungan sebesar-besarnya, dan senantiasa melakukan inovasi atau pengembangan dari usaha yang dilakukan tersebut. oleh karena itu manajemen perusahaan harus benar-benar dapat menjalankan perusahaan sesuai dengan fungsinya, yakni membuat perusahaan bisa maju dan berkembang.

Suatu perusahaan minimal harus mempunyai struktur sebagai berikut:

#### 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

- a. Anggota direksi diangkat oleh rapat umum pemegang saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 tahun dan dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- b. Para anggota direksi dapat diberi gaji dan tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh rapat umum pemegang saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham dapat dilimpahkan pada komisaris.
- c. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 hari sejak terjadinya kelowongan tersebut harus diselenggarakan rapat umum pemegang saham untuk mengangkat direksi baru dan untuk sementara perseroan diurus oleh komisaris.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan wakil pemegang saham yang mempunyai wewenang tertinggi dalam perusahaan untuk mengatur dan mengawasi jalannya perusahaan. Adapun tugas dan wewenang dari dewan komisaris adalah:

- a. Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada anggota direksi.
- b. Dewan komisaris dapat memeriksa semua pembekuan surat dan alat bukti lainnya. Memeriksa dan mencocokkan keadaan keuangan dan lain-lain.
- c. Berhak untuk mengetahui segala kegiatan perusahaan yang telah dijalankan oleh direksi.
- d. Memberhentikan dengan sementara anggota direksi apabila anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Direktur

Direktur mempunyai tanggung jawab penuh terhadap segala kegiatan perusahaan kepada para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham.

Tugas dan tanggung jawab direktur adalah sebagai berikut:

- a. Direksi bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dengan i'tikad baik untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tujuannya dan selalu mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku.

- b. Direksi mewakili perseroan didalam dan diluar tentang semua hal dan segala kejadian yang mengikat perseroan dengan pihak lain.
- c. Melakukan koordinasi dengan seluruh manager dan kepala bagian yang ada.
- d. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan strategi operasional untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham.
- e. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengevaluasi serta mengendalikan jalannya perusahaan agar tetap sesuai dengan kebijaksanaan dan anggaran dasar perusahaan.
- f. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerjasama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan.
- g. Memeriksa dan mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya dan menilai prestasi dan potensi karyawannya.
- h. Menentukan tentang pengangkatan, promosi, mutasi, dan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan-karyawannya.
- i. Menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan, promosi, mutasi, dan pemutusan hubungan kerja, terhadap karyawan-karyawan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Memberikan otoritas atau persetujuan mengenai pengeluaran penerimaan uang yang sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham.
- k. Mempertanggung jawabkan hasil usaha dan kegiatan perusahaan dalam rapat umum pemegang saham.

**4. General Manager**

Bertugas membantu tugas-tugas direktur utama dan merupakan perusahaan kepada direktur. Adapun tugas dari general manager adalah:

Menetapkan orang yang paling bertanggung jawab penuh dalam kegiatan operasi

- a. Kebijaksanaan perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai dengan pedoman yang telah digariskan oleh direktur.
- b. Mengawasi jalannya operasi perusahaan, keuangan, dana pembukuan, kelancaran tugas masing-masing bagian, serta mengikuti perkembangan dan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang perekonomian.
- c. Memberikan laporan pertanggung jawaban atas hasil usaha dan kegiatan perusahaan setiap bulan kepada direktur utama.

**5. Divisi Account/keuangan**

Divisi keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan masalah pembukuan ataupun pencatatan transaksi yang bersifat keuangan bagi perusahaan. Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pencatatan semua data keuangan yang terdapat dalam perusahaan.
- b. Bertanggung jawab terhadap pengawasan biaya-biaya proyek dengan menyusun suatu anggaran.
- c. Bertanggung jawab terhadap bukti-bukti dan faktur penyusunan laporan keuangan.
- d. Menangani semua urusan yang berhubungan dengan pajak, seperti pengisian SPT, PPH pembayaran pajak dan lain-lain.

#### 6. Divisi Teknik/Proyek

Divisi teknik/proyek bertugas dan bertanggung jawab sebagai:

- a. Mengatur dan melaksanakan proses pembangunan mulai dari bahan baku Membuat rekomendasi tentang kebutuhan bahan dan membuat laporan tentang pemakaian bahan.
- b. Bertanggung jawab sampai bangunan jadi.
- c. sepenuhnya atas keselamatan kerja dan mengawasi buruh.

#### 7. Logistik

Bagian ini meliputi pengadaan, pergudangan dan peralatan.

Dalam memenuhi kebutuhan proyek yang akan dikerjakan baik material langsung ataupun tidak langsung maka bagian inilah yang akan memenuhinya.

#### 8. Security Proyek

Tugas dari security proyek ini adalah memberikan pengamanan pengadaan, pergudangan dan peralatan proyek dibagian logistik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 9. Divisi Umum dan Administrasi

Bagian umum dan administrasi mengatur segala kegiatan administrasi yang ada didalam perusahaan. Kegiatannya adalah:

- a. Membuat laporan administrasi baik kualitas maupun kuantitas usaha yang telah dijalankan.
- b. Menyiapkan bukti-bukti kegiatan perusahaan seperti surat pengantar, faktur dan lainnya.
- c. Menyiapkan dokumen pengiriman barang baik perusahaan maupun dokumen dinas atau instansi yang berwenang.

## 10. Divisi Pemasaran

Divisi pemasaran mempunyai hak dan wewenang dalam memasarkan hasil-hasil produksi sesuai dengan produksi atau barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan.

## C. Dasar Hukum Perusahaan

Dasar Hukum Perusahaan adalah setiap pihak yang menciptakan kaidah atau ketentuan Hukum Perusahaan. Pihak-pihak tersebut dapat berupa badan legislatif yang menciptakan undang-undang, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang menciptakan kontrak, hakim yang memutus perkara yang menciptakan yurisprudensi, masyarakat pengusaha yang menciptakan kebiasaan mengenai perusahaan. Dengan demikian, Hukum Perusahaan itu



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdiri dari kaidah atau ketentuan yang tersebar dalam perundang-undangan, kontrak, yurisprudensi, dan kebiasaan mengenai perusahaan.<sup>28</sup>

#### 1. Perundang-undangan

Perundang-undangan dalam hal ini meliputi undang-undang peninggalan Hindia Belanda di Indonesia pada masa lampau, namun masih dianggap berlaku dan sah hingga saat ini berdasarkan atas peralihan UUD 1945, misalnya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) ,KUH Perdata. Selain itu juga perundang-undangan yang termasuk mengenai perusahaan di Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang terus dilaksanakan dan dikembangkan hingga saat ini.

Perundang-undangan lain yang menjadi sumber hukum:

- a. Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
- b. PP No. 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan,
- c. Undang-undang No. 32 Tahun 2007 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi,
- d. Undang-undang No. 33 dan 34 Tahun 1964 tentang Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja,
- e. Undang-undang No. 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing,
- f. Undang-undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri,
- g. Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,
- h. Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan,
- i. Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,
- j. Undang-undang No.7 Tahun 1987 tentang Penyempurnaan Undang-undang No.6 Tahun 1982,
- k. Undang-undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten
- l. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek,

#### 2. Kontrak Perusahaan

<sup>28</sup> Pujiyono, *hukum perusahaan*, cv.indotama. solo.h17

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kontrak perusahaan atau yang biasa juga disebut dengan perjanjian selalu ditulis dan dianggap sebagai sumber utama hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan. Apabila saat tertentu terjadi perselisihan antara pihak-pihak terkait, dalam hal ini saat kontrak perusahaan masih berlaku, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui perdamaian, arbitase, atau pengadilan umum sekali pun jika tidak ditemui penyelesaian yang jelas. Tentunya kontrak perusahaan ini yang akan memberikan pertimbangan tertentu sekaligus secara jelas akan mempengaruhi putusan. Karena secara jelas semua menyangkut kontak dan ketentuannya telah tercantum dalam kontrak tersebut.<sup>29</sup>

#### 2. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah sumber hukum perusahaan yang dapat diikuti oleh pihak-pihak terkait. Hal ini akan mengisi kekosongan hukum, terutama jika terjadi suatu sengketa terkait pemenuhan hak dan kewajiban. Secara otomatis, yurisprudensi ini akan memberikan jaminan perlindungan atas kepentingan pihak-pihak, terutama bagi mereka yang berusaha di Indonesia.

#### 3. Kebiasaan

Kebiasaan merupakan sumber hukum khusus yang tidak tertulis secara formal. Kebiasaan sebagai sumber hukum dapat diikuti pengusaha tatkala peraturan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban tidak tercantum dalam undang-undang dan perjanjian. Karena itulah kebiasaan yang telah

<sup>29</sup> Ibid., 18

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku dan berkembang di kalangan pengusaha dalam menjalankan perusahaan dengan lazim menjadi panutan untuk mencapai tujuan sesuai kesepakatan. Kebiasaan yang biasanya dapat menjadi acuan bagi perusahaan adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang bersifat perdata
- b. Mengenai hak serta kewajiban yang harus dipenuhi
- c. Tidak bertentangan dengan undang-undang atau sumber hukum lainnya
- d. Diterima oleh semua pihak secara sukarela karena telah dianggap sebagai hal yang logis dan patuh
- e. Menerima dari berbagai akibat hukum yang dikehendaki oleh semua pihak<sup>30</sup>

#### D. Fungsi dan Tujuan Perusahaan

**Fungsi perusahaan dibagi ke dalam beberapa segi, yaitu:**

1. Fungsi Ekonomi. Sebuah perusahaan memiliki tugas utama yaitu memonitoring, menganalisis dan menyelidiki terkait perekonomian perusahaan itu sendiri.
2. Fungsi Akuntansi, berguna untuk menjaga kekayaan perusahaan, memastikan prosedur perusahaan dijalankan dengan baik, menjaga keandalan informasi akuntansi serta mendorong efisiensi kerja dalam perusahaan.

---

<sup>30</sup> Ibid.,h19

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Fungsi Produksi, yaitu menciptakan hingga menambah fungsi dari sebuah barang atau bisa juga jasa. Proses produksi tentunya ada berbagai macam yang bisa disesuaikan dengan bidang perusahaan bergerak.
4. Fungsi Pemasaran, yaitu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan melalui proses pertukaran yang saling menguntungkan antara produsen dan konsumen. Banyak metode pemasaran yang digunakan oleh setiap perusahaan bergantung pada kreativitas masing-masing untuk bisa mendapatkan perhatian dari konsumennya.
5. Fungsi Personalia, merupakan pegawai atau personel yang diberikan tanggung jawab sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Sehingga adanya fungsi personalia ini juga sangat penting untuk menjaga agar efektivitas serta efisiensi pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan dapat berjalan secara optimal sesuai yang diharapkan sebelumnya.

#### E. Tujuan Perusahaan

1. Tujuan perusahaan penting dikenali dalam dunia bisnis. Perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan dalam melakukan produksi dan distribusi. Kegiatan itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Kegiatan produksi dan distribusi dilakukan dengan menggabungkan berbagai faktor produksi, yaitu manusia, alam dan modal. Hasil suatu produksi dapat berupa barang dan jasa, yang ditujukan untuk masyarakat luas. Tujuan perusahaan biasanya adalah untuk memperoleh laba. Namun ada juga



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan produksi yang tujuannya bukan untuk mencari laba. Contohnya saja yayasan sosial, keagamaan, dan lain-lain.

2. Tujuan perusahaan mungkin sudah sering disebutkan sebelumnya, yaitu untuk memperoleh keuntungan atau laba. Namun, ada juga perusahaan yang memiliki tujuan perusahaan bukan hanya untuk keuntungan saja. Perusahaan tentunya memiliki banyak tujuan karena perusahaan hadir guna untuk memenuhi kebutuhan ekonomis manusia.
3. Tujuan perusahaan adalah untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
4. Tujuan perusahaan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Hal ini merupakan target yang bersifat kuantitatif dan pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan kinerja perusahaan.
5. Tujuan perusahaan sangat penting sehingga perumusan misi dan visi perusahaan harus dilakukan dengan serius. Misi dan visi perusahaan harus dirumuskan sependek mungkin dengan spesifikasi yang jelas sehingga setiap orang akan selalu mengingatnya.
6. Tujuan perusahaan juga berisikan tentang komitmen beserta risikonya. Tujuan ini juga untuk menggambarkan arahan bagi perusahaan secara jelas, dalam merumuskannya tujuan harus memberikan ukuran yang lebih spesifik.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Alumni, Bandung, 1994), h.48



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### TINJAUAN PUSTAKA

##### A. Tinjaun Umum Tentang Kepailitan

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karna kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberasan kepailitan dilakukan oleh curator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit tersebut secara propesional dan sesuai dengan struktur kreditur.<sup>32</sup>

Terminology kepailitan sering dipahami secara tidak tepat oleh kalangan umum. Sebagian dari mereka menganggap kepailitan sebagai vonis yang berbau tindakan kriminal serta merupakan suatu cacat hukum atas subjek hukum, karena itu kepailitan harus dijauhkan serta dihindari sebisa mungkin. Kepailitan secara *apriari* dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan karna kesalahan dari debitur dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan utang tidak mampu dibayar. Oleh karna itu kepailitan sering diidentikkan

<sup>32</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan*, (Nuansa Aulia: Bandung, 2006), h.34

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggelapan hak-hak yang seharusnya dibayarkan kepada kreditur. Kepailitan tidak merendahkan martabatnya sebagai manusia, tetapi apabila ia berusaha untuk memperoleh kredit, disanalah baru terasa baginya apa artinya sudah pernah dinyatakan pailit.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, di mana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada krediturnya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitur, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitur tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitur tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Kepailitan adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu protate parte* dalam rezim hukum harta kekayaan. Prinsip *paritas creditorium* berarti semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak ataupun barang yang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitur dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitur dapat dipergunakan untuk menyelesaikan kewajiban debitur. Sedangkan prinsip *pari passu protate parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara propesional antara mereka, kecuali apabila

antara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.<sup>33</sup>

## B. Sejarah Kepailitan

Pailit, *failliet* (dalam bahasa Belanda), atau *bankrupt*, (dalam bahasa Inggris). Pailit pada masa Hindia-Belanda tidak dimasukkan dalam KUH Dagang (*Wetboek van Koophandel*) dan diatur dalam peraturan tersendiri kedalam *Faillissements-verordening*, sejak 1906 yang dahulu diperuntukkan bagi pedagang saja tetapi kemudian dapat digunakan untuk golongan mana saja. Masalah pailit sebagaimana peraturan lainnya, dirasakan sangat penting keberadaannya. Pada tahun 1997, ketika krisis ekonomi melanda Indonesia dimana hampir seluruh sendi kehidupan perekonomian nasional rusak. Krisis tersebut membawa makna perubahan yang sangat penting bagi perkembangan peraturan kepailitan di Indonesia selanjutnya. Disadari bahwa peraturan lama dan yang masih berlaku ternyata tidak bias menyesuaikan dengan kebutuhan perubahan zaman. Oleh karena itu, pada tahun 1998, pemerintah mengeluarkan undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan, yang merupakan :<sup>34</sup>

- a. Perbaikan terhadap *Faillissements-verordening* 1906
- b. Adanya penambahan pasal yang mengatur tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
- c. Mengenai istilah pengadilan niaga, di luar pengadilan umum untuk menyelesaikan sengketa bisnis.

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis*, (Garaha Ilmu: Yogyakarta, 2009), h.14



Selanjutnya pada 2004, pemerintah mengeluarkan lagi Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang merupakan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan sebelumnya. Undang-undang tentang kapailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang didasarkan pada beberapa asas.

Asas-asas tersebut antara lain :

- a. Asas keseimbangan, yaitu disatu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di pihak lain, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kapailitan oleh kreditur yang tidak beriktikad baik.
- b. Asas kelangsungan usaha, dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap berlangsung.
- c. Asas keadilan, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusuhakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak memedulikan kreditur lainnya.
- d. Asas integrasi, asas ini mengandung pengertian bahwa system hukum formal dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari system hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Undang-undang kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditur dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan utang yang tidak dibayar. Dalam perkembangannya kemudian, undang-undang kepailitan juga bertujuan untuk melindungi debitur dengan memberikan jalan untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh, sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang.<sup>35</sup>

### C. Pengertian Pailit

Pailit adalah suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua kreditur secara adil dan tertib, agar semua kreditur mendapat pembayaran menurut imbalan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan.<sup>36</sup>

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 37 Tahun 2004.

Adapun yang dapat dinyatakan pailit adalah seorang debitur (berutang) yang sudah dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya lagi. Pailit dapat dinyatakan atas :

- a. Permohonan debitur sendiri
- b. Permohonan satu atau lebih krediturnya. (menurut pasal 8 sebelum diputuskan pengadilan wajib memanggil debiturnya).
- c. Pailit harus dengan putusan pengadilan (pasal 2 ayat 1)

<sup>35</sup> Sentosa Sembiring, *Op.Cit*, h.39

<sup>36</sup> Abdul R.Saliman, *Op.Cit*, h.120

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Pailit bias atas permintaan kejaksaan atau kepentingan umum (pasal 2 ayat 2), pengadilan wajib memanggil debitur (pasal 8).
- e. Bila debiturnya bank, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- f. Bila debiturnya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh badan pengawas pasar modal (Bapepam).
- g. Dalam hal debiturnya perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pension, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan public, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing. Sedangkan tujuan pernyataan pailit sebenarnya adalah untuk mendapat suatu penyitaan umum atas kekayaan debitur (segala harta benda disita/dibekukan) untuk kepentingan semua orang yang menutangkannya (kreditur). Prinsip kepailitan itu adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua berpiutang secara adil.

#### **D. Lembaga Kepailitan**

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar utangnya.

Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu:

- a. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur.
- b. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Pihak yang dapat ditunjuk sebagai hakim pengawas adalah seorang hakim pengadilan yang dianggap mampu menjalankan tugasnya. Tugas hakim pengawas adalah sebagai berikut:

1. Memimpin rapat verifikasi.
2. Mengawasi pelaksanaan tugas kurator/Balai Harta Peninggalan, memberikan nasihat dan peringatan kepada kurator/Balai Harta Peninggalan atas pelaksanaan tugas tersebut.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menyetujui atau menolak daftar tagihan-tagihan yang diajukan oleh para kreditur.
4. Meneruskan tagihan-tagihan yang tidak dapat diselesaikan dalam rapat verifikasi kepada hakim pengadilan niaga yang telah memutus perkara tersebut.
5. Mendengar saksi-saksi dan para ahli atas segala hal yang berkaitan dengan kepailitan.
6. Memberikan izin atau menolak permohonan si pailit untuk bepergian, meninggalkan tempat kediamannya.
7. Menentukan hari perundingan pertama atau rapat verifikasi dengan para kreditur.

Hal-hal yang dibicarakan dalam rapat pertama, yaitu sebagai berikut:

1. Pencocokan utang, yaitu mencocokkan jumlah utang yang tercatat dalam perusahaan/debitur pailit dengan catatan para kreditur.
2. Penentuan kreditur konkuren, yaitu kreditur yang diutamakan pembayaran utangnya. Pihak yang termasuk kreditur konkuren adalah:
  - a. para pekerja dari perusahaan pailit yang gaji/upahnya belum dibayar.
  - b. Para kreditur pemegang Hak Pertanggungan Atas Tanah (HPAT).
8. mengadakan perdamaian. Hal yang perlu untuk diusahakan agar tercapai perdamaian atau persetujuan para kreditur adalah pembayaran gaji, uang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pesangon, dan uang penghargaan masa kerja pekerja/ buruh yang diberhentikan karena pailit, dan penundaan pembayaran utang debitur.<sup>37</sup>

Pernyataan di atas dapat dipahami bahwa, terhadap perusahaan yang pailit dilakukan pengawasan oleh hakim dari pengadilan niaga, agar dalam pengurusan harta dari perusahaan yang pailit tersebut memang benar-benar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

### E. Pengurusan Harta Pailit

#### a. Hakim pengawas

Hakim pengawas atau *Rechter Commisaris* (dalam bahasa Belanda) seperti yang diatur dalam pasal 65 adalah hakim yang diangkat oleh pengadilan untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.

- 1) Kalau masalah kepailitannya besar (kakap) dapat diangkat panitia kreditur.
- 2) Memimpin rapat verifikasi, rapat untuk mengesahkan piutang-piutang.

#### b. Kurator

##### 1) Tugas kurator

Menurut pasal 69 undang-undang No.37 tahun 2004, kurator memiliki tugas :

- a) Melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.

<sup>37</sup>Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h.221

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Segala perbuatan kurator tidak harus mendapat persetujuan dari debitur.
- c) Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga (dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit).
- d) Kurator itu biasanya Balai Harta Peninggalan (BHP), atau kurator lainnya.

#### c. Menjadi Kurator

Menurut pasal 70 ayat 2 yang dapat menjadi kurator adalah :

- a) Orang perseorangan yang memiliki keahlian khusus untuk itu (mengurus atau membereskan harta pailit dan domisili di wilayah RI).
- b) Terdaftar di Departemen Hukum dan Perundang-undangan.

#### d. Kurator dapat diganti

Menurut pasal 71 ayat 1 UU No.37 tahun 2004 seorang curator dapat diganti, pengadilan dapat mengganti, memanggil, mendengar curator, atau mengangkat curator tambahan:

- a) Atas permohonan curator sendiri.
- b) Atas permohonan curator lainnya, jika ada.
- c) Usulan hakim pengawas
- d) Atas permintaan debitur pailit
- e) Atas usul kreditur konkuren.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## e. Tanggung jawab kurator

Menurut pasal 72 UU No.37 tahun 2004, seorang curator mempunyai tanggung jawab :

- a) Terhadap kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengelolaan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.
- b) Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya (pasal 73 ayat 1)
- c) Kurator harus menyampaikan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan (pasal 74 ayat 1)
- d) Upah kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

## f. Panitia Kreditur

Putusan pailit atau dengan penetapan kemudian, pengadilan dapat membentuk panitia kreditur sementara terdiri dari tiga orang yang dipilih kreditur yang dikenal dengan maksud memberikan nasehat kepada curator. Setelah pencocokan utang selesai dilakukan, hakim pengawas wajib menawarkan kepada kreditur untuk membentuk panitia kreditur tetap.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, kurator bertanggungjawab terhadap harta perusahaan atau hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan yang pailit tersebut. oleh karena itu



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu dibentuk panitia kreditur yang dipilih oleh kreditur untuk memantau kinerja dari kurator, dan memberikan nasihat, pendapat dan pandangan kepada kurator terhadap kinerja yang dilakukannya.

Kurator harus benar-benar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya, dan tidak bertujuan untuk mengambil keuntungan dari perusahaan yang pailit tersebut. oleh karena itu apapun yang dilalukan oleh kurator harus ada laporan pertanggungjawabannya kepada kreditur, agar apa yang dilakukan oleh kurator tersebut tidak merugikan kreditur atas utang-utang debitur yang pailit tersebut.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengurusan harta perusahaan yang dinyatakan pailit dilakukan oleh kurator yang ditunjuk oleh hakim dan diawasi oleh hakim pengawas. Kurator wajib melaporkan semua kegiatan yang dilakukan terhadap aset perusahaan kepada hakim pengawas dalam jangka waktu tiga bulan sekali. Kurator bertindak atas dasar kepentingan perusahaan yang pailit, agar dapat menyelesaikan semua kewajiban perusahaan.
2. Kendala yang dihadapi dalam pengurusan harta perusahaan yang dinyatakan pailit, antara lain adalah kendala dalam melakukan pendataan terhadap administrasi atau surat-surat aset atau harta perusahaan. Kemudian kendala dalam menjual aset perusahaan yang tidak sesuai dengan harga yang dikehendaki karena penawaran yang rendah, serta kendala dari pihak kurator yang melakukan kecurangan terhadap pengurusan harta perusahaan yang dinyatakan pailit tersebut.

#### B. Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi pengurus dari perusahaan yang sudah dinyatakan pailit sebaiknya tidak lepas tangan dari kewajiban yang harus dilaksanakan

oleh perusahaan. Pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan tersebut harus memberikan bantuan dan perhatian kepada kewajiban yang harus diselesaikan oleh perusahaan.

2. Bagi kurator yang telah diberi amanah oleh hakim, harus benar-benar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur hukum, dan mempunyai iktikad baik untuk mengurus semua hutang-hutang perusahaan yang harus dibayar, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan perusahaan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Salim, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2010
- Adrian Sutedi, *Good Corporate Government*, Sinar Garafika, Jakarta, 2011
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Persada*, Jakarta, 2007, RajaGrafindo
- Badrul Zaman Mariam Daru, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005
- Gorys Keraf, Komposisi, *Nusa. Indah*, Jakarta, 1989
- Hasbullah F. Syawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- I.G. Rai Wijaya, *Hukum Perusahaaan*. Kesaint Blanc, Jakarta, 2000
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*, Alumni, Bandung, 2006
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis*, Garaha Ilmu: Yogyakarta, 2009
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009
- Pujijono, *hukum perusahaan*, cv.indotama. Solo, 2014
- Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986
- Tahun 2004 Tentang Kepailitan
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006



Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  
PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN BERDASARKAN  
UNDANG –UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 ”**, yang ditulis oleh:

Nama : **ASRA DARMA PUTRA**  
NIM : **11427101524**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juli 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Heri Sunandar, MCL**

Sekretaris  
**H. Henrizal Hadi, Lc., M.Si**

Penguji I  
**Lysa Angraini, SH., MH**

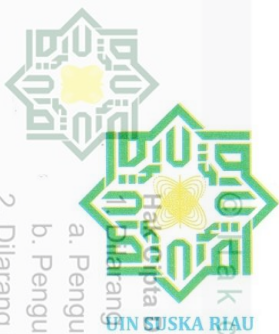
Penguji II

**Asril, SH., MH**

Mengetahui :  
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/3985/2021

Pekanbaru, 09 Juni 2021

Sifat : Penting

Lamp. : -

Hal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada

Yth. Firdaus, SH, MH

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

*Assalamu'alaikum warhmatullahi wabarakatuh*

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : ASRA DARMA PUTRA

NIM : 11427101524

Jurusan : Ilmu Hukum S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Tinjauan yuridis terhadap pengurus dan pemberesan harta pailit oleh kurator dalam penyelesaian perkara kepailitan berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004"

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl

NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:

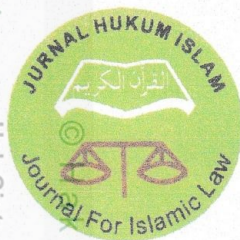
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : ASRA DARMA PUTRA  
**NIM** : 11427101524  
**JURUSAN** : ILMU HUKUM  
**JUDUL** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGURUSAN DAN  
 PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR DALAM  
 PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN BERDASARKAN  
 UNDANG – UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004

**PEMBIMBING: FIRDAUS, SH.MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 26 Juli 2021

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
 NIP. 19880430 201903 1 010